

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang menjadi bagian dari negara yang termasuk pada Persemakmuran Inggris (*Common Wealth*). Seperti kebanyakan negara-negara anggota *Common Wealth* lainnya, Pakistan juga menerapkan sistem pemerintahan parlementer dimana Presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja, sedangkan Perdana Menteri berperan sebagai pemimpin perpolitikan negara. Oleh sebab itu, Perdana Menteri memiliki kuasa dalam memutuskan setiap kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri Pakistan.

Sejak kemerdekaannya, Pakistan menyatakan diri sebagai negara Republik Islam Pakistan atau *Islami Jumhuriya e-Pakistan*. Sesuai dengan namanya, Islam adalah agama mayoritas di Pakistan. Hampir 97% dari total jumlah penduduknya adalah Muslim termasuk di dalamnya wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan.¹ Oleh sebab itu, Pakistan merupakan negara dengan komposisi penduduk mayoritas Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.

Dilihat dari stabilitas dalam negerinya, selama ini sistem politik Pakistan telah berganti-ganti antara lemah, pemerintahan demokrasi yang tidak stabil, dan pemerintah otoriter, yang biasanya dipimpin oleh rezim militer.² Situasi politik dalam negeri yang

¹ http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1809?_hi=1&_pos=1

² Cohen, Setephen P. 2011. *The Future of Pakistan*. Chapter title : *Pakistan: Arrival and Departure*. Brookings Institution Press. Hal 27.

tidak stabil dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Dari segi perekonomian, Pakistan merupakan negara yang termasuk pada kategori *lower middle income*, dengan GDP mencapai 73,95 miliar dolar pada tahun 2000.³ Selain itu berdasarkan indeks pembangunan manusia atau SDM, Pakistan berada pada posisi 146. Dari kedua indikator tersebutlah dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Pakistan masih rendah.

Dari kondisi politik dan ekonomi di atas, dapat dikatakan bahwa situasi dalam negeri Pakistan tidak stabil sehingga seyogianya kedua hal tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah Pakistan. Karena kedua faktor tersebutlah yang dapat menjadikan suatu negara dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, kepuasan rakyat merupakan hal yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam suatu negara yang berideologikan Islam.

Selain itu, kondisi dalam negeri tersebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Pakistan. Dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri, negara atau para pembuat kebijakan pasti akan memperhatikan situasi domestik negara tersebut sehingga akan menjadi suatu kebijakan yang dapat di tujukan kepada negara lain (kebijakan luar negeri). Hal ini berlaku juga di Pakistan, bagi Pakistan identitas diri dari rakyat dan lingkungan geopolitik wilayahnya merupakan dua hal penting dalam setiap pengambilan kebijakan luar negerinya. Ditambah lagi peran militer dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam pemerintahan Pakistan, militer telah menjadi kekuatan

³ <http://data.worldbank.org/country/Pakistan>

sentral baik dalam politik maupun kebijakan strategis yang dilakukan oleh negara ini⁴. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah awal kemerdekaan Pakistan, dimana militer menjadi salah satu aktor penting dalam pemerintahan sehingga ketika ada masalah, baik itu politik maupun ekonomi, tentara akan mengambil alih dalam penanganannya.⁵ Memang ketika kekuatan militer ikut berperan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pasti ada keuntungan dan kerugian yang akan berdampak pada pemerintahan tersebut, begitu juga yang terjadi dengan Pakistan. Peran militer dalam setiap pengambilan kebijakan dirasa cenderung represif sehingga sebagian masyarakat merasa keputusan pemerintah tidak adil.

Terpisahnya Pakistan Timur pada tahun 1971, menjadi salah satu konsekuensi yang harus diterima oleh Pakistan ketika perlakuan pemerintah dirasa tidak adil oleh rakyatnya sendiri dalam hal manajemen wilayah yang berimbas pada stabilitas dalam negeri, sehingga penyelesaian masalah dengan cara militer merupakan salah satu jalan yang diambil oleh Pakistan guna menangani permasalahan yang terjadi dalam negeri. Selain itu faktor ketimpangan politik dan ekonomi menjadi sebab lainnya sehingga wilayah Timur Pakistan terpisah dan sekarang menjadi Bangladesh.⁶

Pembahasan mengenai Pakistan tidak pernah lepas dari isu mengenai wilayah Kashmir yang selama ini menjadi daerah sengketa antara Pakistan dan India. Kashmir merupakan wilayah strategis yang selama ini diklaim Pakistan sebagai bagian dari

⁴ Cohen, Setephen P. 2013. *Shooting for a Country*. Washington D.C. Brookings Institution Press. Hal 92.

⁵ Smruti S. Pattanaik, *Civil-Military Coordination and Defence Decision-Making in Pakistan*.

⁶ 1998. Pemerintah lokal dan otonomi daerah di indonesia, thailand dan Pakistan. PPW-LIPI

wilayahnya. Secara keseluruhan Kashmir memiliki luas 222.36 Km² dan berada diantara Pakistan, India, Tiongkok dan Afganistan. Letaknya yang strategis membuat Kashmir sering dikatakan sebagai jantung Asia di kawasan Asia Selatan. Selain itu Kashmir juga terkenal dengan keindahan alamnya. Tanahnya yang subur dengan Lembah Kashmir yang letaknya antara Himalaya dan Gunung Pir Panjal, terdapat aliran sungai es Siachen di ketinggian 6000 meter di atas permukaan laut. Semua itu menjadikan Kashmir diberi julukan atas keindahan alamnya yang luar biasa yaitu *A garden of eternal spring and an iron fort to a palace of kings*. Kekayaan alam Kashmir ini sedikitnya memberikan pemasukan devisa sekitar 400 juta dolar per tahun dari para wisatawan mancanegara.

Meski demikian, Pakistan bukan satu-satunya negara yang mengklaim Kashmir sebagai bagian dari wilayah teritorinya, namun India juga melakukan hal yang sama. Bagi India, Kashmir merupakan bagian dari negaranya yang tidak terpisahkan. Letak geopolitik Kashmir menjadi daya tarik tersendiri bagi India yang tidak lain adalah akan bermanfaat bagi kekuatan nasional. Dengan dikuasainya wilayah Kashmir secara keseluruhan akan memungkinkan bagi India untuk memiliki akses terhadap wilayah strategis di bagian barat daya karena hubungan India dengan 3 negara tetangga pentingnya yakni Rusia, Tiongkok dan Afganistan itu bergantung pada luasnya wilayah Kashmir yang dikuasainya.

Melihat langkah yang diambil oleh India tersebut Pakistan tidak dengan mudah menyerahkan wilayah Kashmir pada India. Pakistan melakukan segala cara agar Kashmir tidak direbut oleh India. Pakistan menyatakan bahwa Kashmir merupakan

bagian dari wilayahnya. Hal ini didasarkan pada sejarah dan nama Pakistan itu sendiri. Kata “Pakistan” merupakan gabungan beberapa etnik seperti P mewakili etnik Punjab, A mewakili etnik Afghani, K mewakili etnik Kashmiri, S mewakili etnik Sindhi, dan Tan mewakili etnik Baluchistan.⁷

Saling klaim wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menimbulkan konflik diantara kedua negara. Konflik tersebut sampai pada ranah perang (*War*) pada tahun 1947, dengan diawali invasi militer Pakistan terhadap Kashmir. Maka setelah itu Pakistan dan India bersepakat untuk membuat suatu garis pembatas antara kedua negara di wilayah Kashmir. Maka pada tahun 1949 kedua negara menyepakati resolusi garis batas wilayah Kashmir *Cease Fire Line (CFL)* yang nantinya berkembang menjadi garis *Line of Control (LoC)* pada Agustus 1972⁸. Pada dasarnya garis batas tersebut membagi dua wilayah Kashmir yakni *Pakistan Over Kashmir (PoK)* dan India *Over Kashmir (IoK)*. Namun dengan adanya garis tersebut tidak menjadikan hubungan Pakistan dan India membaik, kedua negara selama ini terkesan menjalin hubungan yang konfrontatif penuh dengan rasa curiga dan tidak percaya satu sama lain. Sehingga keduanya terus menerus meningkatkan kapasitas negaranya, khususnya dalam bidang keamanan dan militer.

Selama perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan setidaknya telah beberapa kali pecah perang, yakni pada tahun 1947, 1965 dan 1971 serta ditambah

⁷ Surwandono, Ahmadi, Sidiq. 2011. *Dinamika Konflik di Dunia Islam*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

⁸ M Finsa Arrahman, *Penggunaan Kekuatan Pakistan dan India dalam Mempertahankan Wilayah Kashmir Pasca Perang Dingin*. Universitas Airlangga. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-M%20Finsa%20Arrahman.doc> Dipetik pada tanggal 28 Desember 2015.

perang Sianchean dan Kargil. Dari runtutan perang tersebut masing-masing negara mengalami kerugian. Tetapi jika dibandingkan dengan India, Pakistan lebih banyak mengalami kerugian, hal ini terlihat dari setiap peperangan Pakistan yang selalu merasa dirugikan. Pakistan terus berusaha mengimbangi kekuatan India khususnya dalam bidang militer. Pengembangan senjata nuklir menjadi salah satu isu yang dirasa menjadi *deterence* diantara kedua negara.

Isu pengembangan senjata nuklir oleh pemerintah Pakistan mencuat di tahun 1989 setelah Pakistan melakukan uji coba senjata nuklir di wilayah Kashmir. Proyek senjata nuklir tersebut dikembangkan oleh Pakistan dengan bantuan Amerika dengan tujuan untuk menjadi penyeimbang kekuatan dengan negara-negara tetangga khususnya India. Dari perlakuan Pakistan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan Pakistan dengan India mulai memburuk kembali pada tahun-tahun selanjutnya yakni antara tahun 1990-2000. Puncaknya adalah meletusnya kembali perang diantara kedua negara di distrik Kargil, Kashmir pada tahun 1999. Dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pakistan tersebut, terlihat bahwa keinginan Pakistan untuk memasukan Kashmir ke dalam wilayahnya meruapakan hasrat yang tidak akan pernah sirna. Oleh sebab itu Pakistan akan terus berusaha untuk mempertahankannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menemukan sebuah pokok permasalahan yaitu ;

“Mengapa Pakistan berupaya untuk mengintegrasikan Khasmir ke dalam integral wilayah kedaulatannya ?”

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam menganalisis masalah Mengapa Pakistan berupaya untuk mempertahankan wilayah Khasmir sebagai bagian dari kedaulatannya, maka penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) yang dianggap sangat relevan dalam menjawab permasalahan tersebut.

Konsep Kepentingan Nasional (*Natinal Interest*)

Kepentingan Nasional merupakan sebuah konsep yang populer dalam studi hubungan internasional, oleh sebab itu konsep ini seringkali digunakan oleh para ahli untuk menganalisis sebuah masalah yang terjadi dalam dunia politik internasional khususnya masalah yang terjadi dalam hubungan antar negara. Kepentingan nasional secara umum dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut sarana yang dilakukan adalah dengan melalui kebijakan politik setiap negara. Kebijakan dalam negeri suatu negara terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya sedangkan kebijakan luar negeri terkait dengan kepentingan internasional.

Hans J. Morgenthau, menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.⁹ Dalam arti lain bahwa kepentingan suatu negara didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan negara tersebut dan Hans menganalogikan kekuasaan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi suatu negara.

Dalam kaitannya dengan masalah Pakistan yakni tidak dapat dipungkiri bahwa upaya Pakistan dalam mempertahankan wilayah Kashmir sebagai bagian dari integralnya adalah sebagai cara untuk Pakistan dalam menggabungkan wilayah kekuasaannya, selain itu kesamaan budaya, sumber daya alam dan kelebihan lainnya yang dimiliki oleh wilayah tersebut menjadi penopang kepentingan Pakistan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri Pakistan. Kashmir bukan hanya wilayah yang strategis bagi Pakistan, lebih dari itu dengan Pakistan menguasai Kashmir seutuhnya maka cita-cita awal berdirinya Pakistan yakni mendirikan negara Islam di kawasan Asia Selatan akan terwujud. Hal tersebut akan menjadi daya tawar tersendiri bagi Pakistan di tengah perpolitikan internasional khususnya diantara negara-negara Islam.

Sementara Jack C. Plano dan Roy Olton memaparkan konsep kepentingan sebagai berikut:

*“... the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. These include self-preservation, independence, teritorial integrity, military security and economic well-being”.*¹⁰

⁹ Mas'oed, Muchtar, (1990), Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi, Jakarta, LP3ES. Hal 140.

¹⁰ Jack C. Plano dan Ray Olton, *The international Relation Dictionary.*, USA. 1969. Hal 128.

Dari pemaparan Plano dan Olton tersebut dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan determinan paling fundamental yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan luar negeri suatu negara, sehingga kepentingan nasional secara singkat dapat dipahami sebagai serangkaian elemen yang membentuk kebutuhan serta keperluan vital suatu negara. Adapun elemen-elemen dari kepentingan nasional tersebut adalah mencakup pertahanan diri (*self preservation*), mempertahankan diri (*independence*), integritas teritorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).

Dari elemen-elemen di atas, ada dua elemen yang berkorelasi dengan kepentingan dalam mengintegrasikan Kashmir sebagai integral kedaulatannya. Elemen tersebut adalah *Self-Preservation* atau mempertahankan diri dan integritas teritorial (*Territorial integrity*). Sejatinnya upaya Pakistan dalam mempertahankan wilayah Kashmir merupakan keinginan untuk menjaga eksistensi Pakistan sebagai sebuah negara yang memegang nilai-nilai Islam dan juga menggabungkan wilayah tersebut dan masuk sebagai kesatuan teritorial Pakistan.

Self-Preservation merupakan usaha negara untuk mempertahankan diri demi meneruskan kelangsungan hidup atau *survival*. Kenneth Waltz mengatakan bahwa *self-preservation* merupakan bagian penting yang mungkin dimiliki oleh setiap negara dalam mencapai tujuannya.¹¹ Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pakistan sebagai bentuk mempertahankan diri dalam kaitanya dengan mengintegrasikan wilayah

¹¹ Reimer, Mirco. Do states always prioritize self-preservation above considerations of morality or justice?. Dipetik dari http://www.academia.edu/6453093/Do_states_always_prioritize_self_preservation_above_considerations_of_morality_or_justice Pada tanggal 02 Januari 2016.

Kashmir yaitu memperkuat kemampuan militernya. Hal ini dilakukan agar Pakistan dapat mengimbangi kekuatan India yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas Kashmir.

Dari hal tersebut terlihat bahwa kepentingan Pakistan terhadap Kashmir berkaitan dengan usaha Pakistan untuk mempertahankan diri sebagai negara yang sejak awal dibentuk menjadi sebuah tanah air atau tempat Berindung umat Islam yang teraniaya oleh pemerintahan India. Kemudian pentingnya Kashmir bagi Pakistan juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik wilayahnya. Secara geopolitik posisi Kashmir berada di tengah-tengah antara Pakistan dan India. Bagi kedua negara tersebut Kashmir merupakan daerah yang sangat penting, namun karena mempunyai kesamaan identitas dengan Pakistan maka Pakistan menganggap bahwa Kashmir seharusnya masuk pada territorial Pakistan, sebab sejak diberlakukannya asas partisi oleh kerajaan Inggris, jelas bahwa daerah yang mayoritas di huni oleh masyarakat Muslim masuk pada wilayah Pakistan sementara yang daerah yang mayoritas Hindu masuk pada territorial India.

Selain itu juga, bagi Pakistan Kashmir merupakan ruang hidup bagi Pakistan sehingga dapat dikatakan jika Kashmir jatuh maka Pakistan pun akan jatuh. Kashmir telah menjadi *buffer area* bagi Pakistan untuk eksistensinya sebagai negara, sebab nama Pakistan itu sendiri berupa gabungan dari etnik-etnik Islam yang diantaranya adalah etnik Kashmiri yang mewakili daerah Kashmir. Apabila dilihat dari susunan katanya, Kashmir diletakan di tengah-tengah dalam nama “Pakistan”, hal tersebut menandakan bahwa Kashmir merupakan wilayah inti. Oleh sebab itu, Pakistan perlu

mempertahakannya agar dapat menompang eksistensi Pakistan sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Integritas territorial atau yang sering disebut juga dengan Integritas Nasional (*National Integrity*) menurut Howard Wriggins berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari satu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.¹² Hal ini berkaitan dengan *nation building* yang merupakan sebuah pembentukan atau penataan identitas nasional dengan menggunakan negara sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Hal inilah yang hendak dilakukan oleh Pakistan, karena Pakistan merupakan gabungan dari beberapa etnik yang memiliki kesamaan budaya yakni Islam, maka Pakistan hendak menggabungkan etnik-etnik tersebut sehingga dapat menjadikan Islam sebagai sebuah identitas bersama atau nasional.

Selaras dengan Wriggins, integrasi menurut Myron Weiner merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional.¹³ Dalam hal ini, negara sebagai suatu institusi tertinggi terdiri dari berbagai identitas dan wilayah sehingga sudah menjadi tugas negara untuk menyatukan identitas-identitas tersebut agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat membentuk suatu identitas yang mencirikan dari negara tersebut. Hal inilah yang ingin dibangun oleh Pakistan sebuah identitas diri sebagai negara yang berideologikan Islam.

¹² Diepetik dari http://www.academia.edu/9368243/INTEGRASI_NASIONAL pada tanggal 07 Januari 2016

¹³ Ibid.

Dari pernyataan Wriggins dan Weiner di atas, integritas teritorial merupakan upaya Pakistan dalam membangun jati diri Pakistan sebagai negara Islam. Oleh sebab itu, perlu bagi Pakistan untuk menstabilkan integritas wilayahnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan tersebutlah terkadang Pakistan harus berjuang secara ekstra khususnya dalam membawa Kashmir kedalam diri Pakistan.

Dari beberapa deskripsi mengenai konsep kepentingan nasional di atas, konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisa tujuan atau kepentingan nasional yang melatarbelakangi Pakistan yang berupaya untuk mengintegrasikan Kashmir ke dalam wilayah kedaulatan Pakistan. Upaya tersebut diperkirakan tidak hanya semata-mata untuk menguasai atau mengeksploitasi wilayah Kashmir akan tetapi ada satu hal lain yang menjadi alasan penting bagi Pakistan mengapa harus mempertahankan wilayah tersebut. Misalnya membangun identitas nasional Pakistan yang memegang idiologi Islam dan menjaga satu kesatuan wilayah dalam negara tersebut. Namun demikian, India sebagai negara tetangga Pakistan juga memiliki kepentingan yang sama di wilayah Kashmir, sehingga India juga bersikeras dan tidak mau melepas Kashmir begitu saja pada Pakistan.

Seperti yang telah diketahui bahwa pasca kemerdekaan India dan Pakistan pada tahun 1947, kedua negara menyepakati asas partisi atau pembagian wilayah, yakni dimana wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim masuk pada kedaulatan Pakistan sedangkan wilayah yang penduduknya mayoritas Hindu masuk pada kedaulatan India. Dalam asas tersebut Kashmir seharusnya masuk pada kedaulatan Pakistan. Karena pada kenyataannya penduduk Kashmir mayoritasnya beragama Islam, dan secara jelas mereka menyatakan penggabungan dengan Pakistan seraya merayakan kemerdekaan

Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Namun hal itu ditentang oleh kerajaan Kashmir, yang dipimpin oleh raja yang beragama Hindu sehingga disanalah awal mula kemunculan konflik di wilayah Kasmir dimana yang pada perkembangannya India selaku negara yang dekat dengan Kashmir juga ikut campur dan bertekad untuk menguasai wilayah tersebut sehingga menimbulkan konflik antara India dan Pakistan. Sehingga di sini terlihat bahwa ada keterbenturan kepentingan antara India dan Pakistan sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil dugaan atau kesimpulan sementara, bahwa alasan kepentingan Pakistan dalam mengintegrasikan Kashmir ke dalam wilayah integral wilayah kedaulatannya yaitu:

1. Mempertahankan Kashmir sebagai basis *self-preservation* negara Pakistan.
2. Menjaga Keutuhan wilayah (*territorial integrity*) negara Pakistan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan dan kepentingan pemerintah Pakistan berupaya mempertahankan wilayah Kashmir sebagai bagian dari kedaulatan Pakistan.
2. Membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pakistan dalam mempertahankan wilayah Kashmir.

3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana SI pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup waktu dan jangkauan penelitian yang menjadi objek dari penulisan serta dari subjek penelitian itu sendiri guna memeperjelas bahasan dari penulisan karaya tulis ini.

Adapun jangkauan waktu penelitian ini yakni ketika meningginya kembali tensi antara hubungan Pakistan dan India di wilayah Kashmir pada tahun 1990 sampai 2000. Dalam rentan waktu tersebut peran Pakistan dalam mempertahankan wilayah Kashmir mulai meningkat kembali, diawali dengan percobaan senjata nuklir di wilayah tersebut pada tahun 1989 yang ditanggapi serius oleh India. Seperti diketahui bahwa India merupakan seteru abadi Pakistan dalam perebutan wilayah Kashmir. Puncaknya yakni di tahun 1999, dimana terjadi perang antara India dan Pakistan di wilayah Kargil, Kashmir. Namun hal-hal maupun kejadian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya turut jadi perhatian penulis.

G. Metode Penelitian

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi literature. Data-data didapat melalui menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel,

media masa maupun elektronik seperti internet dan laporan atau tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya dibahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka peimikiran, hipotesa, tujuan penulisan dan metode penelitian.

Bab II : Akan membahas sejarah dan dinamika hubungan Pakistan dan India dalam sengketa wilayah Kashmir. Dengan sub pembahasan yakni sejarah Pakistan, kondisi dalam negeri Pakistan, hubungan Pakistan dengan Kahsmir dan Hubungan Pakistan dengan India, serta dinamika konflik antara Pakistan dan India dalam perbutan wilayah Kahsmir.

Bab III : Membahas mengenai Kashmir dan upaya Pakistan dalam mengintegrasikan ke dalam integral wilayah kedualatannya.

Bab IV : Membahas mengenai kepentingan Pakistan dalam mengintegrasikan Kashmir sebagai bagian dari integral wilayah kedaulatannya.

Bab V : Merupakan bahasan kesimpulan menegani kebijakan dan kepentingan pemerintah Pakistan dalam mempertahankan Kaashmir sebagai bagian dari integral Pakistan.